

PENGEMBANGAN MADRASAH: MENUJU MADRASAH BERDIKARI

Lutfi Hakim, Mag

Abstrak

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Dengan demikian, ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam pergumulan politik pendidikan Nasional, sejak diberlakukan Undang-Undang RI No. 02 Tahun 1989 eksistensi madrasah semakin jelas dan kedudukannya semakin kuat. Ini berarti madrasah telah menjadi satu kesatuan (bagian integral) dari sistem pendidikan Nasional. Dalam struktur pendidikan Nasional, madrasah menjadi bagian dari jenis pendidikan umum yang diberi ciri khas Islam dan bukan lagi menjadi bagian dari jenis pendidikan keagamaan. Hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat penyelenggara dan pengelola madrasah untuk memecahkan beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka meningkatkan mutu, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan mampu berperan lebih kongkrit dalam gerak pembangunan di bidang pendidikan sebagai bagian terpenting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana arah yang dituju oleh pendidikan Nasional. Selain itu secara spesifik sejak awal, madrasah didirikan dalam rangka peningkatan kualitas keimanan, dan ketakwaan kepada Allah SWT serta peningkatan kesadaran umat islam untuk berperan secara aktif dalam gerak pembangunan nasional secara

menyeluruh. Tulisan ini mengkaji modal dasar yang dimiliki oleh madrasah, tantangan pokok yang dihadapi dan strategi yang dilakukan dalam pembangunan kemandirian madrasah

Kata-kata kunci : pengembangan, madrasah, berdikari

Karakteristik dan modal dasar

untuk mencermati realitas sosial pendidikan Islam untuk saat ini, tampaknya perlu adanya pengembangan pada institusi pendidikan Islam. Untuk melakukan pengembangan itu antara lain dengan melakukan sebuah refleksi pemikiran yang eksploratif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, berupa penelitian, seminar, ceramah ilmiah, simposium, lokakarya dan lain sebagainya dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik dan menjanjikan. Salah satu hasil yang menggembirakan bagi transformasi pendidikan Islam di jaman orde reformasi adalah hasil amandemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan telah diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diberlakukannya PP. Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dengan demikian eksistensi pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional.

Sebelum lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, madrasah diniyah dikenal sebagai madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada waktu pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di madrasah diniyah. Tumbuh kembangnya madrasah diniyah ini dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya agar dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah madrasah diniyah tetap dapat bertahan. Walaupun hingga saat ini madrasah diniyah kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan, namun peran penting madrasah diniyah merupakan hal yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama.¹

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Ada dua teori yang dikemukakan para pakar sejarah pendidikan mengenai asal-usul

¹UU Sisdiknas Tahun 2003 (Jakarta: SL Media, 2011), hlm. 22.

berdirinya madrasah di Indonesia. Teori pertama menyebutkan bahwa dalam tradisi pendidikan di Indonesia, pada dasarnya madrasah merupakan adopsi atau islamisasi dari tradisi persekolahan Barat yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Menurut teori ini, madrasah merupakan lembaga pendidikan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan (Islam).. Teori kedua menyatakan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia dipengaruhi cukup kuat oleh tradisi madrasah di Timur Tengah pada masa modern. Dari sudut pandang kedua teori tersebut, asal-usul pertumbuhan madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi, yaitu adanya respon pendidikan Islam terhadap politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia (Makshum, 1999)

Pada mulanya madrasah didefinisikan sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan menjadikan pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajaran (Peraturan Menteri Agama RI No. 1/1946 dan No. 7/1950). Pasca SKB tiga Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri) tahun 1975, Madrasah didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum. Dalam perkembangan berikutnya madrasah dinyatakan sebagai sekolah yang bercirikan agama Islam (Undang-undang RI No. 02 tahun 1989). Akhirnya madrasah menjadi bagian integral dari pendidikan dasar dan menengah (Undang-undang RI No. 20 tahun 2003). pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam dapat mencakup: (1) kepala sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan aktifitas kependidikannya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, serta tenaga-tenaga penunjang pendidikan (seperti pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan lain-lain) yang mendukung terciptanya suasana, iklim dan budaya keagamaan Islam di sekolah/madrasah atau perguruan tinggi tersebut, dan atau (2) komponen-komponen aktifitas pendidikan seperti kurikulum atau program pendidikan, peserta didik yang tidak sekedar pasif-reseptif, tetapi aktif-kreatif, personifikasi pendidik/guru, konteks belajar atau lingkungan, alat/media/sumber belajar, metode, dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.

Dari kedua pengertian pendidikan Islam tersebut, maka pengertian pertama lebih menekankan aspek kelembagaan dan program pendidikan Islam, dan yang kedua lebih menekankan pada aspek ruh dan spirit Islam yang melekat pada setiap aktifitas pendidikan.²

pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam dapat mencakup: (1) kepala sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan aktifitas kependidikannya yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, serta tenaga-tenaga penunjang pendidikan (seperti pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan lain-lain) yang mendukung terciptanya suasana, iklim dan budaya keagamaan Islam di sekolah/madrasah atau perguruan tinggi tersebut, dan atau (2) komponen-komponen aktifitas pendidikan seperti kurikulum atau program pendidikan, peserta didik yang tidak sekedar pasif-reseptif, tetapi aktif-kreatif, personifikasi pendidik/guru, konteks belajar atau lingkungan, alat/media/sumber belajar, metode, dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.

Dari kedua pengertian pendidikan Islam tersebut, maka pengertian pertama lebih menekankan aspek kelembagaan dan program pendidikan Islam, dan yang kedua lebih menekankan pada aspek ruh dan spirit Islam yang melekat pada setiap aktifitas pendidikan.³

Ciri khas ke-Islaman yang melekat pada madrasah merupakan identitas utama yang harus tercermin dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Selain itu juga menunjukkan orientasi pendidikannya yang holistic dan tidak hanya terbatas pada cita-cita praktis, karena menempatkan nilai-nilai spiritual dan transcendental dalam proses pencapaian tujuan. Karena itu, menurut Husni Rahim (2001) guna menandai ciri khas ke-Islamannya, dalam proses pembelajaran di madrasah harus diupayakan “*spiritualisasi bidang studi umum*” dan sekaligus memberikan “*nuansa iptek pada pembelajaran mata pelajaran agama Islam*”.

Selain ciri khas keagamaan Islam sebagaimana terurai di atas, madrasah juga memiliki beberapa keunikan yang sekaligus menjadi modal dasar bagi upaya pengembangannya. Di antaranya adalah : (1). Madrasah didirikan dan dikembangkan di atas fondamen semangat swadaya masyarakat Islam yang secara ideologis-kultural memiliki komitmen tinggi terhadap dakwah Islam melalui jalur pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa madrasah itu lahir, tumbuh

²Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), hlm. 14-15.

³Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), hlm. 14-15.

dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang membentuk, membina dan mengembangkannya. Keunikan ini merupakan modal dasar yang sangat berarti bagi pembangunan kemandiri madrasah karena peluangnya lebih terbuka untuk memperoleh dukungan dana dan sumber daya manusia dari lingkungan masyarakat muslim pendukungnya. (2). Madrasah memiliki fleksibelitas dan independensi yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar madrasah di Indonesia adalah milik swasta, sehingga madrasah dapat bergerak lebih luwes dan leluasa dalam menggali, memanfaatkan dan mengoptimalkan pengembangan potensi-potensi yang dimilikinya. Misalnya, dalam mengurus ihwal rumah tangganya, mengambil kebijakan-kebijakan yang mendasar dan strategis untuk kemajuannya, merekrut tenaga-tenaga edukatif maupun administrative dengan kualifikasi yang diinginkan, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan pengembangan potensi-potensi lainnya. Terbukti bahwa madrasah yang mampu mendayagunakan modal dasar yang dimilikinya dengan baik dan cermat, mampu berkembang lebih pesat dari pada madrasah atau sekolah negeri. Namun demikian, harus pula diakui bahwa tidak sedikit madrasah yang “*hidup segan mati tak mau*”

Tantangan pokok

Pada dasarnya tantangan yang di hadapi madrasah dewasa ini merupakan konsekwensi logis dari keberadaannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Nasional. Masuknya madrasah dalam kesatuan Sistem Pendidikan Nasional mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-peraturan lainnya tentang pendidikan. Secara garis besar tantangan pokok yang dihadapi madrasah dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek yakni aspek manajemen, akademik dan sarana/prasarana.

Kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan negara berpengaruh secara signifikan pada manajemen pendidikan. Akibatnya sejak tahun 1999 mulai diberlakukan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk menggantikan pola manajemen lama yang sangat sentralistis. MBS juga dimaksudkan sebagai suatu pengalihan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kepada sekolah/madrasah dan komunitasnya. Dengan kata lain, MBS merupakan perwujudan pola manajemen pendidikan yang lebih otonom dan demokratis. Sekolah/madrasah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengkoordinasikan sumber daya secara mandiri dengan

melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu lembaganya. Dengan pelimpahan kekuasaan dan wewenang ini, maka madrasah dituntut untuk memantapkan struktur organisasi dan pembenahan manajemen yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas, serta berfungsinya control dalam pendayagunaan sumber dana dan tenaga, sehingga dicapai hasil guna yang optimal bagi kemajuan madrasah yang bersangkutan. Selain itu, madrasah dituntut untuk merubah orientasi pengelolaan “*asal bisa bertahan*” dan “*cenderung sekenanya*” ke arah pengembangan idealisme dan etos kerja para pengelolanya. Hal lain yang juga menjadi tantangan madrasah dalam aspek manajemen adalah peningkatan peran serta masyarakat untuk memikirkan nasib dan keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah merupakan potensi, bukan hanya dilihat dari segi rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*), tetapi sekaligus juga menjadi factor penting untuk menjamin kelangsungan hidup (*sustainability*) madrasah sebagai lembaga pendidikan yang populis. Akan tetapi menurut Fatah Syukur (2011) bahwa problem klasik yang sering muncul dipermukaan adalah ketika madrasah sudah berdiri dan berkembang, maka keterlibatan masyarakat untuk memikirkan nasib dan kelangsungan hidup madrasah relative berkurang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi jalur pendidikan, jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas ; pendidikan formal, non-formal dan informal. Jenjang Pendidikan formal terdiri atas ; pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan dibedakan menjadi : pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, madrasah menjadi bagian dari pendidikan umum. Karena itu, status madrasah sama dengan lembaga-lembaga pendidikan umum lainnya (SD, SMP, SMA), sehingga struktur kurikulumnya juga mengalami perubahan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Struktur kurikulum madrasah sama dengan yang berlaku bagi lembaga-lembaga pendidikan umum lainnya. Bedanya, kurikulum agama pada madrasah lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran agama di sekolah umum lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi madrasah, karena pada umumnya madrasah masih kurang akrab dengan bidang

studi umum. Di tambah lagi factor guru yang menurut Husni Rahim (*mantan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*) kendati banyak guru yang layak tapi banyak yang salah kamar. Harus diakui bahwa sudah banyak madrasah yang berusaha untuk melakukan penyesuaian terkait dengan pengadaan guru pengampu mata pelajaran umum, akan tetapi dilapangan juga masih ditemukan guru mata pelajaran agama ditugasi mengajar mata pelajaran umum. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dalam aspek akademik, tantangan yang dihadapi madrasah adalah rekrutmen tenaga pengajar yang memadai baik kuantitas, kualitas maupun ragam spesialisasinya sesuai ketentuan kurikulum. Selain itu, madrasah dituntut untuk menciptakan masyarakat belajar yang professional, yakni tergeraknya semua warga madrasah untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengembangan kualitas pendidikannya sesuai bidang keahlian dan tugas masing-masing. Dalam konteks ini yang harus memulai mengambil inisiatif adalah kepala madrasah dan para guru. Kepala madrasah adalah pemimpin, agen pembaru (*agent of change*), penggerak, innovator dan fasilitator dari sumber-sumber yang ada di madrasah. Sedangkan para guru merupakan komponen utama pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran di Madrasah (Muhaimin, 2003).

Tantangan pokok ketiga adalah penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang memadai, meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain, sesuai ketentuan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42-48 yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana. Dalam aspek ini, pada umumnya madrasah dihadapkan pada dana, sarana dan prasarana yang seadanya. Ruang kelas yang tidak memadai, perpustakaan apa adanya dan laboratorium yang tidak tersedia. Dengan sarana/prasarana yang memadai, proses belajar mengajar di madrasah dapat diselenggarakan dengan tertib dan berkualitas sesuai dengan tuntutan kurikulum serta tujuan didirikannya madrasah itu sendiri.

Strategi Pembangunan kemandirian

Pada dasarnya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI, sudah cukup jelas dan gamblang untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan kemandirian madrasah. Persoalannya hanya terletak pada bagaimana menyiasati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing madrasah.

Untuk itu diperlukan strategi dalam arti pola dan pedoman dasar yang berorientasi pada pembangunan kemandirian madrasah agar mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan umum bercirikan agama Islam. Dengan memerhatikan ciri khas dan modal dasar yang dimiliki serta tantangan pokok yang dihadapi sebagaimana terurai di atas, maka strategi pembangunan kemandirian yang diperlukan madrasah, antara lain :

Pertama : strategi yang menyangkut aspek organisasi dan manajemen. Sebagai lembaga pendidikan, madrasah dituntut untuk mempunyai struktur organisasi dan manajemen yang mapan. Organisasi dan manajemen madrasah yang biasanya dilakukan “*sekenanya*” itu harus dirubah dengan pola manajemen partisipatif sebagaimana dikehendaki dalam Manajemen Berbasis Sekolah. Perubahan ini sangat diperlukan, karena apabila MBS di implementasikan di madrasah dengan benar, maka akan dapat meningkatkan kualitas madrasah secara keseluruhan..

Dalam tataran praktis, MBS memberikan proporsi tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan beberapa fungsi yang didesentralisasikan. Fungsi-fungsi dimaksud menurut Raihani (2010) mencakup proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi program pendidikan, penyusunan kurikulum, rekrutmen dan manajemen staf, pemeliharaan sumber daya dan fasilitas-fasilitas, manajemen keuangan, layanan siswa, kerjasama komunitas sekolah dan penciptaan kultur sekolah. Dalam kontek ini strategi pembaruan organisasi dan manajemen madrasah dimaksudkan untuk memenuhi enam hal dasar, yaitu : (a). penyediaan kepemimpinan dan manajemen operasional madrasah, (b). menyusun perencanaan dan kebijakan madrasah, (c). mengatur aktivitas madrasah, (d). menciptakan komunikasi yang efektif antara madraah dan masyarakat, (e). mendorong partisipasi masyarakat, dan (f). memperkuat akuntabilitas madrasah (Fatah Syukur; 2011).

Masalah ini terkait erat dengan idealisme dan etos kerja serta wawasan manajemen para pengelola madrasah. Idealisme saja tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan etos kerja dan wawasan manajemen kependidikan yang memadai. Karena itu diperlukan peningkatan sumberdaya manusia pengelola madrasah yang setidaknya memenuhi lima kriteria, yaitu sumberdaya manusia yang ;

1. Visioner, yakni pemimpin yang mempunyai wawasan luas dan matang sehingga mampu merumuskan visi dan misi yang bukan hanya bersifat formalitas atau hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan akreditasi dalam rangka memperoleh atau meningkatkan status. Pemimpin yang visioner juga

selalu bertindak proaktif dalam mengikuti perkembangan dan dinamisasi program pendidikan

2. Pemersatu, yakni pemimpin yang mampu mempersatukan semua unsure dan potensi yang berbeda-beda, sehingga menjadi kekuatan yang sinergik dan bermanfaat bagi semua pihak
3. Pemberdaya, yakni pemimpin yang mampu menempatkan diri sebagai motivator, pendorong, suka menolong orang lain untuk mengembangkan dirinya. Sebagai pemberdaya, pemimpin harus memiliki sifat pribadi yang demokratis, inklusif, delegatif, komunikatif, empatik dan responsive
4. Pengendali emosional, yakni memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara rasio dan emosi, sehingga segala persoalan yang dihadapi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal tetapi juga pada kata hati
5. Integritas, yakni senantiasa taat asas, memegang teguh prinsip-prinsip moral dan hukum dalam semua aspek kehidupan

Inti kegiatan manajemen pendidikan madrasah adalah pembuatan keputusan untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Di lihat dari proses pengambilan keputusan, dalam penerapan MBS di madrasah memerlukan pembuatan keputusan secara partisipatif. Karena itu penerapan MBS di madrasah juga meniscayakan adanya maksimalisasi partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam bentuk material, pemikiran, control, pembinaan, maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya menjadi kebanggaan masyarakat lingkungannya.

Sedangkan dari aspek hasil keputusan, diperlukan keputusan inovatif, yakni keputusan yang dianggap baru oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang diambil. Uraian tersebut menggariskan beberapa pemikiran penting dalam pembaruan manajemen pendidikan, antara lain : (a). pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan merupakan penerapan cara-cara baru yang kreatif dan diharapkan dapat meningkatkan mutu proses pengelolaan pendidikan dan hasilnya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (b). Manajemen pendidikan yang inovatif akan mampu mewujudkan tujuan madrasah, secara lebih efektif dan efisien, dan (c). meningkatkan kesadaran para pengelola madrasah akan pentingnya peningkatan mutu manajemen pendidikan di madrasahnyanya (Sudarwan Danim, 2008).

Hal lain yang juga sangat krusial dalam penerapan MBS di madrasah adalah pemantapan visi, misi dan tujuan sebagai arah dan pedoman pengelolaan pendidikan yang dilaksanakannya sehingga tidak kabur. Visi madrasah merupakan inspirasi yang memberikan tujuan-tujuan bagi proses-proses edukasional di madrasah. Selain itu, visi juga dapat memberi inspirasi bagi kepala madrasah untuk menfokuskan program akademik dan non-akademik untuk meningkatkan prestasi siswa. Melalui visi pula, kepala madrasah dapat melakukan inovasi bagi pengembangan kurikulum dan instruksi strategis akademik yang signifikan dalam proses kepemimpinannya (Raihani; 2010). Karena itu, visi seharusnya dirumuskan bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan formal atau tepatnya untuk memenuhi tuntutan akreditasi, tetapi harus dibangun melalui analisis terhadap konteks-konteks madrasah dan konsultasi dengan nilai-nilai yang diyakini semua anggota komunitas madrasah.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan kemandirian madrasah tidak akan terwujud apabila tidak dikelola dengan format manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Maka implementasi MBS di madrasah sangat diperlukan karena pola manajemen ini meniscayakan terciptanya struktur dan kultur demokratis, sehingga peningkatan di semua aspek madrasah akan mudah dan lebih mungkin untuk di capai. .

Kedua : Strategi pembangunan bidang akademik. Manajemen madrasah dengan penerapan pola MBS dianggap berhasil apabila mampu meningkatkan kualitas proses dan produk pendidikan dan pembelajaran. Kualitas proses dan produk dimaksud meliputi input (masukan), proses dan dampaknya. Kualitas masukan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu ; (a). kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala madrasah, guru, pustakawan, laboran, staf tata usaha dan siswa, (b). memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku, kurikulum, sarana-prasarana, madrasah dan lain-lain, (c). memenuhi atau tidaknya kriteria masukan berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi atau sebaran tugas dan kerja, dan (d). mutu masukan yang berupa harapan dan kebutuhan seperti; visi, misi, motivasi, kedisiplinan dan cita-cita. Kualitas proses pembelajaran mengandung makna kemampuan sumber daya madrasah mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Sedangkan kualitas dampak atau hasil pendidikan dapat dilihat dari keunggulan akademik dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan program pendidikannya.

Penetapan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam harus disikapi sebagai rahmat yang memberi peluang agar madrasah tetap eksis, terutama dilingkungan komunitas pendukungnya. Pernyataan sebagai jenis sekolah umum meniscayakan madrasah memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD, SMP dan SMA untuk mata pelajaran umum. Sedangkan cirikhas agama Islam dikembangkan melalui penjabaran mata pelajaran PAI menjadi mata pelajaran : Al-Qur'an-Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, SKI dan Bahasa Arab. Selain itu diperlukan penciptaan suasana kegamaan, misalnya dengan melalui kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah dan penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan. Berdasarkan pemikiran ini, menurut Husni Rahim (2001), salah satu strategi yang dilakukan dalam memberi cirikhas keislaman pada madsarah adalah memberikan “*nuansa Islam*” pada bidang studi umum dan memberikan “*nuansa iptek*” dalam arti memberikan tafsiran kontekstual kekinian pada mata pelajaran agama. Senada dengan pernyataan tersebut, Muhaimin (2003) menyatakan bahwa suasana agamis di madrasah bukan hanya bermakna simbolik (fisik), tetapi lebih jauh dari itu berupa penanaman dan pengembangan nilai-nilai religious (keislaman) pada setiap mata pelajaran yang temuat dalam program pendidikannya. Maka diperlukan guru-guru yang memiliki kemampuan mengintegrasikan wawasan imtaq dan iptek, diperlukan buku-buku yang bernuasa agamis dan bermuatan pesan-pesan agamis pada setiap mata pelajaran yang diprogramkan.

Berdasarkan pemikiran di atas, strategi pengembangan akademik madrasah meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

1. : Merubah pola rekrutmen tenaga pendidik (terutama guru tetap) yang biasanya “*asal dapat*” dan “*asal mau*” dengan pola yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kualitas, profesionalisme dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Menurut undang-undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tenaga pendidik dinyatakan professional jika memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik (pemahaman terhadap peserta didik dan perangkat pembelajaran), kompetensi kepribadian (kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa), kompetensi sosial (kemampuan bergaul dan berkomunikasi), dan kompetensi profesional (penguasaan kurikulum, materi dan metode pembelajaran). Hal ini sangat diperlukan mengingat guru merupakan seorang pendidik, pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, memberi rasa aman,

memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya (Rusman; 2011).

2. Mengingat posisi strategis guru (terutama guru tetap) bagi pembangunan kemandirian madrasah, maka apabila mereka telah menunjukkan goodwill dan kesungguhannya untuk mengabdikan, hendaknya mereka diberikan peran dan kepercayaan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam semua aktivitas madrasah, terutama dalam aktivitas pembelajaran dengan memberi ruang dan kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawab dan peran sertanya dalam proses pengembangan madrasah secara totalitas. Selain itu, perlu diagendakan kegiatan refreshing secara rutin, terutama dalam penguatan pelaksanaan proses pembelajaran—agar tidak hanya berlangsung secara rutin dan tradisional—dimana kegiatan pembelajaran hanya didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab, bukan pengolahan pikiran secara kreatif dan inovatif. Apalagi sejak diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru dituntut untuk menerapkan strategi, metode dan model-model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga ; Strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana ; Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama Bab VII Standar Sarana Prasarana, setiap satuan pendidikan termasuk madrasah wajib memiliki sarana prasarana penunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan., baik berupa perabot, alat-alat dan media pendidikan, maupun lahan, gedung tempat kegiatan belajar-mengajar, ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium dan lainnya. Pengembangan sarana prasarana tersebut bisa berlangsung dalam jangka panjang dan bertahap, sesuai dengan tuntutan perkembangan. Semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan pada aspek manajemen dan akademik semakin banyak pula sarana dan prasarana yang diperlukan. Karena itu, pengembangan sarana dan prasarana madrasah harus didasarkan pada skala prioritas program yang berorientasi pada terwujudnya kemandirian. Skala prioritas tersebut antara lain dapat disusun sebagai berikut :

1. Program pemilikan lahan atau tanah yang cukup sesuai kebutuhan
2. Program pembangunan gedung sekolah dan perkantoran serta pengadaan fasilitas yang diperlukan
3. Program pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas perpustakaan
4. Program pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas laboratorium

5. Program pengadaan fasilitas penunjang, seperti koperasi, UKS, transportasi dan lain-lain

Sudah barang tentu peran dana dalam aspek ini memang sangat menentukan, sekalipun tentu bukan merupakan satu-satunya yang determinan. Kuncinya adalah disiplin pengelolaan dana yang ketat dalam memenuhi ranking prioritas.

Kesimpulan

Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan Islam lahir dari, oleh dan untuk masyarakat. Maksudnya, masyarakatlah yang mendirikan, membina dan mengembangkannya. Ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah begitu kuat sehingga menjadi salah satu potensi dan modal dasar bagi upaya pembangunan kemandiriannya. Di sisi lain ikatan emosional tersebut juga menjadi kendala karena sebagian komunitas pengelola madrasah tidak begitu mudah menerima ide-ide pembaruan sebagai tantangan pokok bagi kemandirian madrasah. Padahal agar madrasah bisa bertahan di tengah era global sekarang ini, salah satunya adalah kemampuannya untuk merespon perkembangan pendidikan yang selalu mengalami perubahan dengan cepat.

Dalam melaksanakan status dan fungsinya sebagai pendidikan umum bercirikan agama Islam, madrasah harus mampu menghadapi berbagai tantangan baik dalam proses pengelolaan maupun peningkatan mutu. Untuk itu diperlukan strategi pembangunan kemandirian madrasah yang meliputi strategi pembangunan di bidang manajemen, bidang kurikulum dan sarana prasarana. Agar strategi pembangunan kemandirian ini tersusun secara lebih sistemik, sudah barang tentu harus bertolak dari visi yang jelas yang kemudian dijabarkan dalam misi, didukung oleh skill, dan sumber daya (fisik non fisik, termasuk SDM) untuk selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja yang jelas. Dan satu hal yang harus selalu diingat bahwa bentuk apapun yang dilakukan bagi pembangunan kemandirian madrasah dalam rangka peningkatan mutu pendidikannya, harus tetap berpegang teguh pada ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Jangan sampai karena mengejar mutu, lupa cirikhas yang merupakan kekuatan utama untuk berkompetisi.

Daftar Pustaka

Haidar Putra Dauly, Prof. Dr. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004

- Fatah Syukur, Dr, *Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2011
- Husni Rahim, Dr, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos, 2001
- Muhaimin, Dr, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Surabaya, PSAPM, 2003
- Raihani, Dr, *Kepemimpinan Sekolah Transformatif*, Yogjakarta, LKiS, 2010
- Rusman, Dr, *Model-model Pembelajaran*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Sudarwan Danim, Prof, Dr, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta, Ar-Ruzz, 2005